

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman, permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mendukung fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Sementara itu, perumahan merupakan kumpulan rumah dalam permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menyediakan rumah yang layak huni.

Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) seperti yang dikutip oleh Wesnawa (2015:2), permukiman dapat diinterpretasikan sebagai struktur buatan manusia atau alami dengan semua fasilitasnya yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk tinggal baik sementara maupun permanen dalam rangka menjalani kehidupan. Finch Vernor C (1957) yang dikutip oleh Su Ritohardoyo (1989:6) mendefinisikan permukiman sebagai kelompok manusia yang tinggal di suatu tempat, mencakup bangunan rumah dan fasilitas lainnya yang digunakan oleh penduduk tersebut. Definisi ini menekankan bahwa permukiman adalah tempat tinggal bagi manusia, tidak hanya sekadar bangunan tetapi juga fasilitas yang mendukung kehidupan penghuninya.

Menurut kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permukiman merupakan tempat tinggal yang menandakan keberadaan manusia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, penanganan masalah permukiman menjadi perhatian nasional.

Seperti di negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga menghadapi masalah permukiman manusia sebagai masalah nasional, terutama akibat

pertumbuhan penduduk yang cepat (Rachmat wiradisuria, 1976). Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata.

Dampak dari masalah ini terlihat dari meningkatnya permintaan akan lahan, baik untuk usaha maupun permukiman. Penduduk yang awalnya tinggal di wilayah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, akibat pertumbuhan penduduk terpaksa menempati wilayah yang kurang layak huni seperti tanah longsor, banjir, dan lereng gunungapi. Karena pertumbuhan dan perluasan permukiman yang tidak teratur, wilayah yang sebelumnya layak huni menjadi tidak layak huni (Nursid Sumaatmadja, 1981: 1982).

Keadaan ini meningkatkan tekanan terhadap sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kepadatan penduduk, terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur, ditambah dengan adanya pegunungan yang membentang dari barat ke timur. Pegunungan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa karena menyediakan tanah yang subur untuk pertanian dan memengaruhi pola hujan setempat, asalkan lingkungan di sekitar pegunungan dijaga dan dikelola dengan baik.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut: “bagaimana perkembangan luas lahan permukiman di daerah bertopografi yang berbeda di wilayah Kecamatan Jogorogo?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis sebaran luas permukiman di Kecamatan Jogorogo.
2. Analisis pola permukiman menurut bentuk topografi di Kecamatan Jogorogo.

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

##### **Kegunaan Teoritis**

Untuk menambah wawasan keilmuan dan mengetahui perkembangan permukiman di daerah penelitian.

##### **Kegunaan Praktis**

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program pengembangan wilayah pada umumnya dan perkembangan permukiman pedesaan di daerah pegunungan pada khususnya, dengan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

#### **1.5 . Telaah pustaka dan penelitian sebelumnya**

##### **1.5.1 Telaah pustaka**

###### **A. Tinjauan Tentang Topografi**

Penjelasan tentang topografi erat kaitannya dengan pengetahuan mengenai geomorfologi. Geomorfologi, menurut Van Zuidam dalam Sutikno (1990), adalah studi yang menjelaskan bentuk lahan dan proses-proses yang memengaruhi pembentukannya, serta meneliti hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses dalam konteks ruang. Kasmono (1984) mendefinisikan geomorfologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan, proses yang memengaruhi bentuk lahan, asal-usul bentuk lahan, serta hubungannya dengan lingkungan dalam ruang dan waktu.

Dari kedua definisi tersebut, pada dasarnya objek kajian geomorfologi adalah bentuk lahan, atau secara spesifik, morfologi yang mempelajari relief. Menurut Way (1973) dalam Van Zuidam (1979), bentuk lahan adalah penampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alami yang memiliki karakteristik fisik dan visual tertentu yang ditemukan di manapun bentuk lahan tersebut berada. Bentuk lahan secara umum memiliki dua aspek, yaitu:

A. Aspek morfologi, yaitu aspek-aspek permanen suatu daerah seperti teras sungai, bentang pantai, dan kipas alluvial.

B. Aspek morfometri, yaitu aspek-aspek kuantitatif dari suatu daerah seperti kemiringan lereng, bentuk lereng, ketinggian, beda tinggi, kekerasan medan, bentuk lembah, tingkat erosi, dan pola aliran.

Penjelasan tentang topografi tidak lepas dari unsur elevasi atau ketinggian tempat. Van Zuidam dalam Sutikno mendefinisikan relief atau topografi sebagai garis-garis ketinggian dari beberapa bagian permukaan bumi yang berdasarkan variasi ketinggian dan kecuraman lereng. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua konsep yang perlu diperhatikan, yaitu variasi ketinggian dan kecuraman lereng. Ketinggian tempat adalah letak suatu tempat di atas permukaan laut, sedangkan kemiringan lahan adalah persentase perbedaan tinggi terhadap jarak proyeksi antara dua titik di permukaan bumi.

Relief (topografi) biasanya direpresentasikan dengan garis kontur pada sebuah peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menunjukkan unsur-unsur alami dan buatan manusia atau bersifat umum (Aziz, 1983). Dalam kaitannya dengan relief, yang perlu diperhatikan adalah kelas lereng, bentuk, dan arah lereng. Kelas

kemiringan lereng yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi lahan, 1986. Berikut adalah kelas dan klasifikasi kemiringan lereng:

Tabel I.1 Kemiringan lereng

KELAS	KEMIRINGAN (%)	KLASIFIKASI
I	0-8	DATAR
II	8-15	LANDAI
III	15-25	AGAK CURAM
IV	25-45	CURAM
V	> 45	SANGAT CURAM

Sumber: pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi lahan, 1986.

## **B. Tinjauan Tentang Permukiman**

A. Permukiman adalah kebutuhan penting bagi manusia dan terbentuk karena berbagai faktor fisik dan nonfisik. Manusia secara bertahap mengembangkan dan mengubah lingkungan menjadi lingkungan buatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan permukiman ini menggambarkan interaksi antara manusia dan lingkungannya.

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992, permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Bintarto (1977) mendefinisikan permukiman sebagai tempat di mana orang berkumpul dan hidup bersama, membangun rumah dan infrastruktur

lainnya untuk kepentingan bersama. Dari definisi ini, studi tentang permukiman tidak hanya mencakup kepadatan, distribusi, dan tata bangunan, tetapi juga tempat kegiatan atau aktivitas penduduk yang memengaruhi lingkungan sekitarnya.

Permukiman di suatu wilayah ada karena adanya kemungkinan hidup bagi masyarakat setempat sesuai dengan keahlian mereka. Semakin besar kemungkinan hidup di suatu tempat, semakin banyak orang yang akan bermukim di sana. Sandy (1977) menyatakan bahwa ada hubungan erat antara kerapatan penduduk dan bentuk permukiman dengan kondisi medan. Permukiman yang padat biasanya berada di dataran alluvial dan semakin berkurang kerapatannya ke arah pegunungan sesuai dengan kemiringan lereng. Di beberapa negara berkembang, pencacahan menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman berada di tempat-tempat dengan ketinggian antara 3-25 meter.

#### Klasifikasi Permukiman

B. Yunus (1987) menyatakan bahwa klasifikasi adalah upaya untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan karakteristik tertentu. Ritohardoyo (1989) mengklasifikasikan permukiman berdasarkan ukuran, fungsi, dan bentuknya.

##### 1. Permukiman Berdasarkan Ukurannya

Metode klasifikasi permukiman yang paling jelas dan sederhana adalah dengan menggunakan ukuran statistik jumlah penduduk. Tabel 1.2 berikut menunjukkan klasifikasi jumlah permukiman berdasarkan jumlah penduduk:

permukiman	Jumlah penduduk (jiwa)
Tempat kediaman	1-10

Dusun	11-100
Desa kecil	111-500
Desa besar	501-2000
Kota kecil	2001-10.000
Kota median	10.001-100.000
Kota besar	100.001-1.000.000
Konurbasi	1.000.001-10.000.000
Megapolis	>10.000.000

Sumber: Ritohardoyo (1989)

## 2. Permukiman menurut fungsinya

Klasifikasi menurut fungsinya tidak bergantung pada angka-angka statistik melainkan menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini memberikan panduan umum untuk mengidentifikasi tipe permukiman tertentu, seperti kota industry, kota pelajar, kota perdagangan dan lain-lain.

## 3. Permukiman Menurut Bentuknya

Pengelompokan permukiman berdasarkan bentuk didasarkan pada struktur bangunan dan sarana pelayanan yang tersedia di setiap lokasi. Menurut Hammord dalam Ritohardoyo (1989), permukiman dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tempat Tinggal Terisolir: Biasanya berupa bangunan rumah pertanian yang berdiri sendiri, terpisah dari rumah pertanian lainnya di luar daerah perkotaan.
- b. Dusun Kecil: Terdiri dari sekelompok kecil perumahan sebanyak 5-10 unit, kadang-kadang dilengkapi dengan sebuah rumah ibadah.
- c. Desa Kecil: Permukiman ini menunjukkan adanya tingkat pelayanan seperti tempat ibadah, penginapan, kantor pos cabang, dan toko serta fasilitas pendidikan.

- d. Desa: Permukiman berbentuk desa memiliki variasi fungsi sosial dan ekonomi yang cukup besar, termasuk tempat ibadah, toko, klinik, dan fasilitas pendidikan.
- e. Kota: Permukiman disebut kota jika selain terdapat pabrik, juga terdapat persaingan yang lebih besar antara berbagai fungsi sarana ekonomi, sosial, dan budaya.
- f. Kota Besar: Permukiman ini memiliki keanekaragaman fungsi yang signifikan, seperti jenis pekerjaan, industri, dan layanan. Kota besar cenderung memiliki sarana transportasi, lembaga keuangan, dan kantor administratif tingkat nasional.
- g. Konurbasi: Merupakan daerah kota besar yang telah berkembang dari penggabungan beberapa kota besar yang sebelumnya terpisah.
- h. Megapolis: Gabungan dari beberapa konurbasi, menjadi zona perkotaan yang sangat besar.

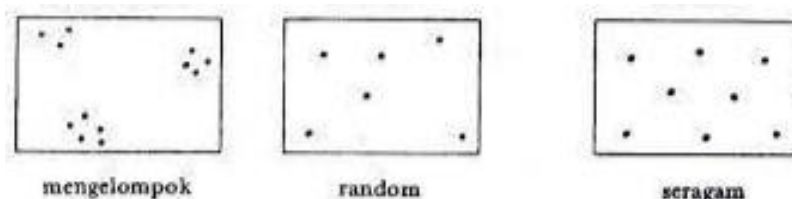
#### Pola Permukiman

Secara etimologis, pola permukiman terdiri dari dua kata: pola dan permukiman. Pola permukiman secara harfiah berarti susunan atau model tempat tinggal di suatu wilayah. Pembahasan tentang permukiman tidak bisa dipisahkan dari persebaran dan pola permukiman karena keduanya saling terkait. Persebaran permukiman mengacu pada lokasi tempat permukiman berada dan di mana tidak ada permukiman, sedangkan pola permukiman merujuk pada sifat dari persebaran tersebut. Dengan kata lain, pola permukiman adalah susunan dari distribusi permukiman dan penyebaran tempat tinggal yang berhubungan dengan lingkungan (Ritohardoyo, 1989).

#### Variasi Pola Permukiman



Persebaran permukiman yang bervariasi tentunya menghasilkan pola permukiman yang berbeda-beda. Persebaran permukiman sangat mempengaruhi keragaman pola permukiman. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang variasi pola permukiman. Hudson (1970) membedakan antara pola permukiman yang mengelompok dan menyebar, sementara Thorpe (1964) membedakan antara tipe memusat dan menyebar. Meski demikian, klasifikasi konkret pola permukiman belum dapat disepakati secara umum. Untuk tujuan pembahasan pola permukiman secara kuantitatif, Peter Haggett (1977) menggunakan metode analisis tetangga terdekat (nearest-neighbour analysis) dan membedakan pola permukiman menjadi tiga: mengelompok, acak, dan seragam (Ritohardoyo, 1989). Metode analisis tetangga terdekat ini adalah bagian dari analisis keruangan yang lebih luas, yaitu perbandingan pola internal.



Gambar I.1 Jenis pola persebaran.

Sumber: Bintaro dan Hadisumarno (1979)

### 1.5.2 Penelitian sebelumnya

Tabel I.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya.

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Sri Firdianti, 2010	Perkembangan permukiman penduduk di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 1997-2007	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan luas penggunaan lahan permukiman penduduk di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 1997- 2007, pola permukiman di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif spasial.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Perkembangan luas lahan permukiman tahun 1997 – 2007 adalah 2,554 hektar besar peningkatan lahan untuk permukimannya. Desa Sawahan merupakan desa yang paling tinggi tingkat perkembangan luas lahan permukimannya yaitu seluas 0,4827 hektar (16,28 %) dan Desa Dibal merupakan Desa yang paling sedikit tingkat perkembangan luas lahan permukimannya yaitu seluas 0,0168 hektar (0,63 %), (2) Berdasarkan teknik analisis tetangga terdekat diperoleh nilai T = 1,6. Nilai tersebut dapat menunjukkan pola persebarannya

		permukiman di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.		berdasarkan pengelompokannya. $T = 1,6$ berarti pola persebaran permukiman di Kecamatan Ngemplak termasuk dalam klasifikasi Random (acak), (3) faktor lokasi, sarana fasilitas sosial yang memadai, tingkat aksesibilitas yang tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk.
Rieke Ariyanti, 2017	Analisis Perkembangan Permukiman Di Kecamatan Laweyan Tahun 2006-2015	tujuan : mengetahui persebaran dan pola persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan Laweyan selama sepuluh tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2015 serta faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman di Kecamatan tersebut.	Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran perkembangan permukiman dipengaruhi oleh tiga penggunaan lahan yaitu : (1) persawahan, (2) lahan kosong, dan (3) perluasan permukiman.

Salis Rahmawan, 2019	Perkembangan Permukiman dan Pengaruhnya Terhadap Daya Dukung Lahan Kota Salatiga	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan permukiman, persebaran permukiman, daya dukung lahan dan pengaruh perkembangan permukiman terhadap daya dukung lahan.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.	<u>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2006-2016 hampir semua Kelurahan di Kota Salatiga mengalami perkembangan kawasan permukiman kecuali Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir.</u>
Didi Irfan Fahyudi, Putu Indra Christiawan, I Made Sarmita, 2021	Perkembangan Luas Permukiman dan Penggunaan lahan pada daerah Peri_Urban Kota Singaraja Tahun 2010,2015 dan 2020.	Tujuan: 1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan tahun 2010,2015 dan 2020. 2.menganalisis proses penggunaan lahan.	Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian: Perubahan penggunaan lahan di daerah pinggiran kota Singaraja, Kecamatan Buleleng mengalami perubahan dari tahun 2010,2015 dan 2020.
	Analisis perkembangan luas permukiman dan pola permukiman di Kecamatan	Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:	Metode penelitian ini menggunakan	Hasil Penelitian: Perubahan penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi sejak

<p>Muhammad Fathul Huda, 2024</p>	<p>Jogorogo Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan 2023</p>	<p>1. Menganalisis sebaran luas permukiman di Kecamatan Jogorogo. 2. Analisis pola permukiman berdasarkan bentuk topografi di Kecamatan Jogorogo.</p>	<p>metode Deskriptif kuantitatif.</p>	<p>tahun 2015 sampai tahun 2023 mengalami perubahan sekitar 9,2 Ha dengan penambahan terbanyak di desa Jogorogo sebesar kurang lebih 2,8 ha atau sekitar 30% dari total penambahan luas permukiman, dengan permukiman cenderung terkonsentrasi pada kelas kemiringan datar sebesar 5,1 Ha dan ketinggian 200-400 m dengan penambahan luas sebesar 6,1 Ha. Berdasarkan pola permukiman, pola permukiman di Kecamatan Jogorogo cenderung mengelompok seperti di desa Brubuh, Dawung, Kletekan, Jogorogo, Macanan, Ngrayudan, Talang, Tanjungsari dan Soco, dengan kemiringan lereng cenderung berada pada kelas kemiringan datar dan landau, serta ketinggian tempat antara &gt;200 m sampai 200-400 m. sedangkajn untuk pola menyebar dan seragam cerderung terpusat pada kemiringan lereng landai, agak curam dan curam dengan ketinggian</p>
-----------------------------------	---	---	---------------------------------------	---

				tempat 400-900 m seperti di desa Girimulyo, Jaten, Hutan Jogorogo dan Umbulrejo.
--	--	--	--	--

Beberapa penelitian berikut menjelaskan tentang perubahan penggunaan lahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian yang meliputi lokasi penelitian, metode penelitian dan fokus tujuan penelitian.

## 1.6 Kerangka penelitian

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan meningkatnya berbagai kebutuhan penduduk untuk hidup. Di daerah pedesaan, salah satu kebutuhan yang dirasakan sangat penting adalah kebutuhan akan lahan. Disamping lahan untuk permukiman dengan segala sarana dan prasarananya, juga lahan pertanian karena kehidupan di pedesaan yang bersifat agraris.

Pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan berpengaruh langsung terhadap terjadinya peningkatan luas lahan permukiman (termasuk lahan pertanian). Apabila perluasan lahan permukiman tersebut terjadi di daerah pegunungan dengan ketinggian tempat dan kemiringan lereng yang bervariasi akan berpengaruh terhadap perkembangan permukiman di daerah tersebut. Gambaran tentang kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar I.2 Diagram alir kerangka penelitian.

### **1.7 Batasan operasional**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan dibahas atau diteliti sehingga akan mempermudah dalam pembahasannya, yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan peta topografi sebagai peta dasar.
2. Penggunaan peta penggunaan lahan tahun 2015 dan tahun 2023 untuk analisis perkembangan luas permukiman berdasarkan perbedaan topografi yang meliputi kemiringan lereng dan ketinggian tempat serta analisis variasi pola permukiman.